

Judul : Perbaiki sekolah rusak, komisi X: percepat pencairan anggaran
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perbaiki Sekolah Rusak

Komisi X: Percepat Pencairan Anggaran

SENAYAN meminta Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perbaikan kudu cepat dilakukan tanpa mengabaikan keselamatan peserta didik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pendataan terhadap tingkat kerusakan setiap sekolah. Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak.

"Pemerintah juga perlu menyediakan ruang belajar sementara agar kegiatan belajar tidak terhenti akibat sekolah rusak," ujar Lalu Hadrian di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 324 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten di NTT rusak akibat gempa per 16 Agustus 2026. Pendataan dan penanganan kerusakan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera ditangani.

Lalu Hadrian mendorong percepatan pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak. Perbaikan fasilitas pendidikan di-

lakukan secara cepat dan terukur, disertai dukungan bagi guru dan siswa yang terdampak bencana. "Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat," tegas politisi PKB ini.

Dalam jangka panjang, Lalu Hadrian menekankan agar pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak sekadar berupa perbaikan bangunan lama. Tapi bangunan yang memenuhi standar konstruksi tahan gempa sehingga lebih aman dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Selain itu, ia meminta Pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Hal itu dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan bagi guru, serta edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan siswa.

"Kesiapsiagaan bencana menjadi bagian penting dari pengelolaan satuan pendidikan, terutama di daerah yang memiliki risiko bencana tinggi seperti NTT. Mitigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik," harap legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Dia mengatakan, transparansi dan pengawasan wajib dilakukan dalam seluruh proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah terdampak gempa. Tujuannya



Lalu Hadrian Irfani

agar anggaran yang dialokasikan Pemerintah tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan.

Senada, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendorong Kemendikdasmen memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana. Mekanisme tersebut penting agar respons Pemerintah dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang terlalu panjang. Utamanya dalam kondisi ketika sarana pendidikan tidak dapat digunakan.

Hetifah juga meminta agar program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara menyeluruh. "Pemulihan tidak hanya men-

cakup gedung sekolah, tetapi juga meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta bantuan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang terdampak," kata Hetifah di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Selain itu, ia meminta Pemerintah memastikan akurasi dan keterpaduan data kerusakan pendidikan di NTT. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, peserta didik dan guru yang terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas darurat perlu segera diverifikasi di lapangan dan diperbarui secara berkala. "Data yang akurat merupakan fondasi penting agar kebijakan rehabilitasi dan bantuan dapat tepat sasaran," tandas politisi Golkar ini.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 50 tenda Ruang Kelas Darurat yang akan dikirim melalui dua klaster distribusi. Klaster pertama mengirim 30 tenda dari penyimpanan di Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo di NTT. Pengiriman tersebut mencakup 1.000 paket Family Kit, 200 paket School Kit umum, dan 2.000 paket School KitSMA/SMK.

Bantuan tersebut, lanjut Mu'ti, ditujukan untuk mendukung kebu-

tuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. "Pengiriman dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026," ujar Mu'ti di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Mu'ti menargetkan, pemasangan tenda mulai 23 Agustus 2026. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTT akan menerima dan mengelola bantuan tersebut melalui Posko Kemendikdasmen di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Klaster kedua, lanjut Mu'ti, akan mengirim 20 tenda dari penyimpanan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang menuju Pelabuhan Ende, NTT. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah terdampak di wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.

Pengiriman klaster kedua menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. "Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 di SKB Ende sebelum logistik didistribusikan ke wilayah sasaran," tutupnya. ■ TIF